

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL.

Lika-liku perjalanan terbentuknya rezim Taliban merupakan sebuah fenomena yang sangat spektakuler. Bagaimana tidak, milisi Taliban pada awal terbentuknya merupakan satu kelompok kekuatan yang berawal dari organisasi sosial yang pada waktu didirikan hanya memiliki anggota sebanyak 800 orang, namun beberapa bulan kemudian jumlah anggotanya meningkat drastis menjadi 250.000 orang¹. Milisi Taliban didirikan bertepatan pada bulan Oktober 1994 di pedalaman Mandahar. Usia Milisi Taliban masih relative muda, tetapi pengaruhnya telah sedemikian besar. Keinginan Taliban untuk membentuk pemerintahan yang berdasarkan Islam, merupakan sebuah semangat yang selalu ada pada waktu itu. Pembentukan pemerintahan yang Islami dianggap hanya dapat dilakukan jika pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu ditumbangkan dengan, kata lain menumbangkan rezim Burhanuddin Rabbani. Perjalanan Taliban dalam merebut kekuasaan sangat singkat, hal ini bisa terlihat hanya dalam kurun waktu 2 tahun (dari 1994 - 1996) Taliban sudah dapat menguasai Kabul (sebuah symbol dalam perebutan kekuasaan) yang ada di Afganistan.

¹ Setiyanto & Sutarno, *Perjuangan Milisi Taliban*, (Yogyakarta; Media pressindo; 2002) hal.44.

Keberhasilan Taliban yang sangat fantastislah yang mau tidak mau memaksa mata dunia untuk menoleh ke Afganistan, termasuk AS yang selama ini tidak terlalu perhatian, juga ikut mulai menanamkan pengaruhnya. Apalagi akhir-akhir ini, setelah Taliban resmi berkuasa, sebagai pemerintahan yang Islami fundamental, selalu menjadi ancaman bagi dunia barat khususnya AS. Runtuhnya rezim Taliban, merupakan hal yang sangat di inginkan AS pada saat itu, karena Rezim ini sangat menentang adanya pengaruh barat yang akan dilakukan oleh AS terhadap Afganistan. Karena itu dengan alasan Taliban menyembunyikan Osama Bin Ladden yang dianggapnya sebagai teroris dengan tuduhan pemboman dua gedung menara kembar yaitu World Trade Center (WTC) dan Pentagon yang terletak di New York dan Washington DC sebagai symbol peradaban kapitalis dan sekaligus perlambang arogansi AS sang adikuasa hancur dalam tempo beberapa menit, Sehingga pada tanggal 7 Oktober 2001, AS menyerang Taliban. Dalam kurun waktu satu bulan, satu per satu kota Afganistan jatuh ke tangan pasukan oposisi yang di monitori kelompok Aliansi Utara dengan dukungan pesawat tempur AS. Dengan runtuhnya Taliban, maka Afganistan secara tidak langsung menjadi tempat yang menjanjikan buat AS untuk menanamkan pengaruhnya sehingga AS bisa mengeruk keuntungan yang sangat besar. Jatuhnya rezim Taliban merubah politik luar negeri AS terhadap Afganistan, di samping untuk memilikikan citra Presiden G.W Bush, akibat penyerangan ke Afganistan tersebut, menjadi kehilangan simpati dari rakyatnya dan masyarakat dunia,

Disamping alasan tersebut juga sebagai mana yang di ramalkan banyak orang bahwa Afganistan merupakan wilayah yang sangat strategis dan menjanjikan.

Penulis menganggap hal tersebut di atas merupakan “Fenomena realistik” yang masih menyimpan banyak pertanyaan, karena alasan tersebutlah penulis tertarik untuk mengambil judul ini dan mengkaji tema tersebut serta menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah.

Untuk itu penulis akan berusaha membahas masalah ini dengan mengajukan penelitian yang berjudul “ Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Pemerintahan Afganistan Pasca Runtuhnya Rezim Taliban “.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Tujuan penelitian ini di maksudkan untuk menjawab permasalahan berdasarkan fakta yang sebenarnya, sehingga dapat terjawab secara ilmiah dengan bahan referensi yang ada.
2. Membuktikan hipotesa berdasarkan teori-teori yang ada.
3. Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap pemerintahan Afganistan setelah AS meruntuhkan rezim Taliban yang dianggap sebagai sarang teroris.

4. Kebijakan politik AS dalam upaya memulihkan citra nya sebagai bangsa yang menghargai hak-hak kebebasan manusia, setelah AS dianggap melakukan invasi militer yang menewaskan warga sipil Afganistan yang tidak bersalah.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Amerika Serikat adalah Negara adidaya yang merupakan salah satu target kriminalitas dari para terorisme. Tanggal 11 September 2001 merupakan insiden terberat yang pernah di alami oleh AS, gedung menara kembar World Trade Center (WTC) dan pentagon yang terletak di New York dan Washington DC sebagai symbol peradaban kapitalis dan sekaligus perlambang arogansi AS sang Adikuasa hancur akibat serangan jibaku para teroris, runtuh dalam tempo beberapa menit. Insiden ini membuat AS sangat terpuruk, tata kehidupan AS menjadi berantakan. Kepanikan menyusul pertanyaan yang bertubi-tubi, sesungguhnya apa yang terjadi. Adakah yang salah dengan pertanyaan AS ?. Rasa tidak percaya menyelimuti pikiran seluruh masyarakat AS bahkan dunia merasa kaget dengan peristiwa hancurnya ke dua gedung penting AS tersebut.

AS menuduh Osama Bin Laden dan kelompoknya Al-Qaeda sebagai teroris yang bertanggung jawab atas insiden 11 September 2001 tersebut. Presiden AS , George W. Bush berpidato di depan rakyatnya, menjanjikan suatu aksi pembalasan dendam yang setimpal yang di tujukan perlawanan terhadap

terorisme. Kongres AS langsung sepakat dengan rencana pembalasan dendam Bush. Dana 40 Miliar Dolar AS di kucurkan untuk membiayai “ perang melawan teroris “². AS gencar melobi negara-negara di seluruh dunia untuk mengutuk serangan terorisme, serta membantu AS mencari pelaku serangan 11 September. Intelejen di siagakan dan di sebar untuk mengungkap siapa di balik itu semua. Analisis intelejen akhirnya mengarah kepada Osama Bin Laden sebagai pelaku aksi terorisme WTC dan Pentagon. Pada dasarnya tuduhan inteligen tersebut hanya sebatas analisa cara para teroris yang melancarkan aksinya. Oleh karena cara kerja kelompok Al-Qaeda dan Osama Bin Laden yang mempunyai pola tersendiri seperti serangan bunuh diri yang terkordinasi pada hari yang sama bertujuan untuk membuat kerusakan maksimum bagi AS, tidak ada peringatan sebelumnya akan serangan tersebut. Analisis itu juga di perkuat dan di tautkan dengan aksi-aksi sebelumnya, di mana Osama Bin Laden diduga kuat melakukan pemboman terhadap kedubes AS di Kenya dan Tanzania tanggal 7 Agustus 1998.

Seiring mengacungnya jari Bush kearah Osama Bin Laden, di AS terjadi tragedi-tragedi susulan yang mengenkinsakan pandangan stereotipikal pemerintah AS terhadap Islam menular dengan cepat kepada masyarakat setempat. Muslim di AS dimusuhi, kendati Presiden Bush telah berpidato di mana-mana bahwa tidak ada kaitan antara teroris yang terjadi dengan ajaran Islam.

² *Ibid...*hal.7

Nama Osama melambung tinggi akibat sering di sebut oleh Bush sebagai aksi teror. Osama adalah usahawan kelahiran Arab Saudi yang dulu gencar memprotes kehadiran tentara AS dan multinasional di Arab Saudi pada waktu memerangi Iran pada tahun 1991. Konon Osama menentang keras kehadiran AS dan sekutunya karena prajurit multinasional itu melakukan tindakan-tindakan yang melecehkan Islam. Osama kemudian bergabung dengan kelompok Anti-Amerika. Menurut keterangan pihak AS, Osama aktif membiayai gerakan Anti-Amerika, pelatihan milisi sipil bersenjata yang di bentuk untuk merongrong kepentingan AS di seluruh dunia.

Pemerintah Arab Saudi (yang menjadi sekutu AS) mencabut kewarganegaraan Osama³. Berbekal jaringan relasinya, Osama pun meninggalkan tanah kelahirannya. Ia menuju Afganistan dan bergabung dengan pemerintahan Taliban. Di Afganistan, Osama seolah menemukan habitatnya yang sesungguhnya. Hubungannya sangat erat dengan penguasa Taliban. Hal itu tidak terlepas dari kontribusinya yang sangat besar bagi perjuangan Taliban. Pemerintahan Taliban pun konsekwen terhadap persahabatannya dengan Osama, terbukti ketika AS mengancam pemerintahan Taliban agar menyerahkan Osama, Pemerintah Taliban dengan tegas menolaknya. Bahkan ketika peluru-peluru dan bom AS menghujani Kabul, Ibu kota Afganistan, Pemerintah Taliban tetap konsisten dengan sikapnya.

³ *Ibid.* hal.8

Pemerintah Taliban memang harus menanggung konsekuensi berat. Banyak bangunan dan infrastruktur lainnya yang rusak berat akibat pengeboman oleh pesawat-pesawat AS dan sekutunya. Selain itu juga Taliban harus menghadapi kelompok oposisi di Utara, yang mendapat dukungan kuat dari AS dan sekutunya. Ini memang keterlaluan. Dukungan itu menandakan sebuah intervensi politis terhadap negara berdaulat.

Serangan AS ke Afghanistan bukan hanya sebuah bentuk intervensi politis, melainkan bukti sebuah tindakan menginjak-injak kedaulatan Negara lain. Walaupun di selimuti i'tikad "*memerangi terorisme*", namun tindakan semacam itu jelas merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Ironis sekali, sebab AS-lah Negara pencetus penghormatan atas HAM dengan *Declaration of Human Rights*⁴ yang di bangga-banggakannya.

Serangan AS telah menghancurkan banyak gedung sipil (bukan instansi militer) serta menewaskan banyak penduduk yang tidak berdosa. Harapan AS untuk segera menangkap Osama dan pengikutnya, cukup jauh dari kenyataan. Dunia kehilangan simpati kepada AS, karena tindakan gegabahnya yang jelas-jelas menginjak-injak kedaulatan Negara lain. Osama dan Taliban kini menjadi simbol perlawanan. Hubungan mereka menjadi model sebuah hubungan yang konsisten dalam situasi apapun.

Sebaliknya AS di ambang rasa simpati masyarakat international. Rasa percaya dan dukungan terhadap "*memerangi terorisme* " dianggap telah di noa:

⁴ *Ibid.*, hal.11.

sendiri oleh AS dengan sikapnya yang selalu gegabah dengan kekuatan militernya. Kegagalan demi kegagalan membuat mata dunia terbuka akan sebuah realitas, di mana AS selalu punya misi di balik sebuah misi. Ada asumsi bahwa jangnan-jangnan AS hanya menjadikan isu teroris sebagai alat untuk menjatuhkan rezim Taliban yang dianggap AS, tidak memberikan peluang baginya untuk menanamkan pengaruhnya di Afganistan. Kepentingan-kepentingan AS selalu di singkirkan dari bumi Afganistan ketika Taliban berkuasa. Akhirnya rezim Taliban berhasil digulingkan oleh AS dan sekutu-sekutunya, termasuk pihak oposisi Utara Afganistan. Taliban dan pengikutnya di buru dan di usir dari kota Kabul. Kejatuhan Kabul menjadi symbol kekalahan bagi Taliban. Siapapun yang menduduki kota Kabul secara militer, berarti sekaligus menguasai secara politik. Logika itulah yang menjadi kenyataan di Afganistan. Logika itupun yang ternyata menjadi rujukan konferensi Bonn, Jerman pada awal Desember 2001 yang berhasil membentuk pemerintahan sementara Afganistan pimpinan PM. Hamid Karzai, yang di ambil sumpahnya pada 22 Desember 2001⁵. Dan pembentukan komite khusus penyiapan sidang Loya Jirga pada 25 Januari 2002.

Pembentukan pemerintahan baru ini, pasca Taliban dengan lebih menonjolkan pada nilai-nilai demokrasi yang berbasis luas sebagai system politik Afganistan untuk menata kembali tatanan kehidupannya. Pemerintahan di bawah kepemimpinan PM. Hamid Karzai hanya untuk sementara waktu, tujuannya untuk

⁵ Mustofa Abd.Rahman, "*Afganistan di tengah arus perubahan*", (Laporan dari lapangan, Jakarta: Kompas, 2002) hal.69.

menyelenggarakan PEMILU yang demokrasi. Pada giliran selanjutnya Pemilu tersebutlah yang akan menentukan pimpinan selanjutnya. Bagi pemimpin baru tidaklah mudah dalam menata kembali pemerintahan Afganistan, di butuhkan kerjasama dari berbagai pihak, baik warga masyarakat Afganistan maupun pihak luar (masyarakat International) yang di harapkan dapat membantu memulihkan pemerintahan baru Afganistan. Untuk memulihkan kembali pemerintahan Afganistan, dibutuhkan dana yang sangat besar. Salah satu negara pendonor adalah Amerika Serikat. AS tidak tanggung-tanggung mengukurkan dana jutaan dollar AS untuk kepentingan Afganistan. Hal ini tidak terlepas dari memperbaiki kesalahan AS menyerang Afganistan yang di anggap masyarakat sebagai arogansi militer dan kekerasan. Selain dari Negara pendonor, Afganistan sendiri juga berusaha untuk menggali sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi Afganistan. letak Afganistan juga di anggap sangat strategis sebagai penghubung antara Asia Tengah dan Laut Kaspia ke Laut Arab, dan Afganistan sebagai perantara penyaluran gas alam dari Turkmenistan ke pesisir Pakistan dengan pembangunan pipa sepanjang 1000 mil dengan menekan biaya 2,5 juta Dollar AS.⁶

Afganistan memang menyimpan kekayaan alam yang cukup signifikan, mulai dari minyak bumi, gas alam dan bahkan cadangan arang batu untuk kebutuhan listrik. Dan di Laut Kaspia tersimpan sekitar 270 miliar barel minyak.⁷

⁶ *Ibid hal.27-29*

⁷ John P.Rossa, *dalam artikel Eriyanto &C.H pontoh, www.yahoo.com* (di kutip penulis dari

Sementara itu di perkirakan Afganistan juga memiliki cadangan minyak sebesar 95 juta barel, di perkirakan cadangan gas alam sekitar 5 trilyun kubik serta memiliki cadangan arang batu untuk kebutuhan listrik sebesar 73 juta barel⁸. Terbentuknya pemerintahan sementara (PM Hamid Karzai) di asumsikan sebagai pemerintahan boneka bentukan AS, yang merupakan salah satu kebijakan dalam memulihkan pemerintahan Afganistan. Kebijakan Politik Luar Negeri AS di delegasikan oleh Presiden AS, GW. Bush dan aktor-aktor politik, Menteri sekretaris dan staf CIA, staf senior di Dewan keamanan Nasional yang tentunya harus bekerjasama dengan Kongres.⁹ Asumsi tersebut dapat di buktikan dengan mati-matiannya AS menyokong dan membantu Afganistan pasca Taliban. Fenomena politik tersebut memaksa AS menerapkan politik luar negeri yang berbeda dari sebelumnya terhadap Afganistan.

D. RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah : *“Mengapa AS melakukan Kebijakan Luar Negeri memulihkan Pemerintahan Afganistan, Padahal AS sendirilah yang telah membombardir bumi Afganistan ? ”*

pengaksesan skripsi tgl 8 Mei 2004)

⁸ Mustafa Abd. Rahman. Op. Cit hal. 97-99.

⁹ William Maley, *fundamentalism Reborn Afganistan & The Taliban (Taliban dan multikonflik diAfganistan* Terjemahan Samson Rahman ,Jakarta: Pustaka Al-kautsar 1990) hal.103

E. LANDASAN TEORITIK

Teori merupakan uraian yang menjelaskan variable-variabel dan hubungan-hubungan antara variabel berdasarkan konsep dan definisi tertentu. Unsur yang paling penting peranannya adalah teori, dengan teori inilah penyusun akan mencoba menerangkan fenomena yang di fokuskan pada politik luar negeri AS terhadap Afganistan pasca runtuhnya rezim Taliban.

Landasan teori di maksudkan adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian sehingga kegiatan ini menjadi jelas, sistematis dan ilmiah.

a. Menurut Moh. Natsir, teori adalah :

Sarana pokok untuk menyatakan hubungan yang sistematis dalam gejala social maupun natural yang ingin di teliti.¹⁰

b. Menurut Koentjaraningrat, teori adalah :

Serangkaian asumsi konstruk, definisi proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.¹¹

Dari pendapat tersebut dapat di mengerti bahwa teori-teori pada dasarnya merupakan penjelasan hubungan sistematis antara fenomena sebagai pola pikir yang sistematis yang dapat menjelaskan suatu fenomena atau gejala. Dan apabila suatu fenomena tersebut merupakan masalah, maka teori dapat di gunakan sebagai pemecah suatu masalah. Teori dapat dikatakan sebagai informasi ilmiah

¹⁰ Moh.Natsir.Ph.d.*Metode Penelitian*, (Jakarta; Ghalia Indonesia,1988) hal.12

¹¹ Masri Singarimbun & Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta; LP3S,1989) hal.37

yang di peroleh dengan meningkatkan abstraksi pengertian-pengertian maupun hubungan proposisi, maka dari itu teori merupakan landasan untuk memecahkan suatu masalah.

Definisi teori setidaknya mengandung dua hal :

1. Teori adalah : serangkaian proposisi antara konsep-konsep yang saling berhubungan.
2. Teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena social dengan cara menentukan mana yang berhubungan dengan konsep yang lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

Selain teori, penulis juga menerapkan pemilahan tingkat-tingkat analisa.

Menurut Patrick Morgan, bahwa unit analisa memiliki lima tingkat analisa yaitu

1. Individu, 2. kelompok individu, 3. Negara dan Bangsa, 4. Kelompok Negara-negara dalam suatu region, 5. Sistem Global¹² Subyek dari penelitian skripsi ini adalah Amerika Serikat yang merupakan level analisa ke tiga yaitu Unit Analisa tingkat Negara dan Bangsa. Menurut Mochtar Mas'oeed bahwa Analisa yang menggunakan tingkat ini berasumsi bahwa semua pembuat keputusan akan melakukan tindakan yang sama dalam menghadapi situasi yang sama, dengan kata lain Politik luar negeri oleh suatu Negara-bangsa sebagai suatu unit yang utuh¹³

¹² Patrick Morgan, *Theories and Approaches to International Politics* (Transaction, 1982)

¹³ Mochtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta : LP3ES, 1990) hal.40-41

Untuk membahas permasalahan tersebut di atas, maka penulis akan menggunakan teori sebagai berikut :

1. TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN (Decision Making Teory)

Menurut William D. Coplin, pengambilan keputusan dalam kebijakan politik luar negeri di pengaruhi oleh tiga (3) variabel yaitu :

- a. Kondisi politik dalam negeri (domestic politic).

Termasuk di dalamnya factor budaya (culture) yang mendasari tingkah laku actor politiknya dalam pengambilan keputusan.

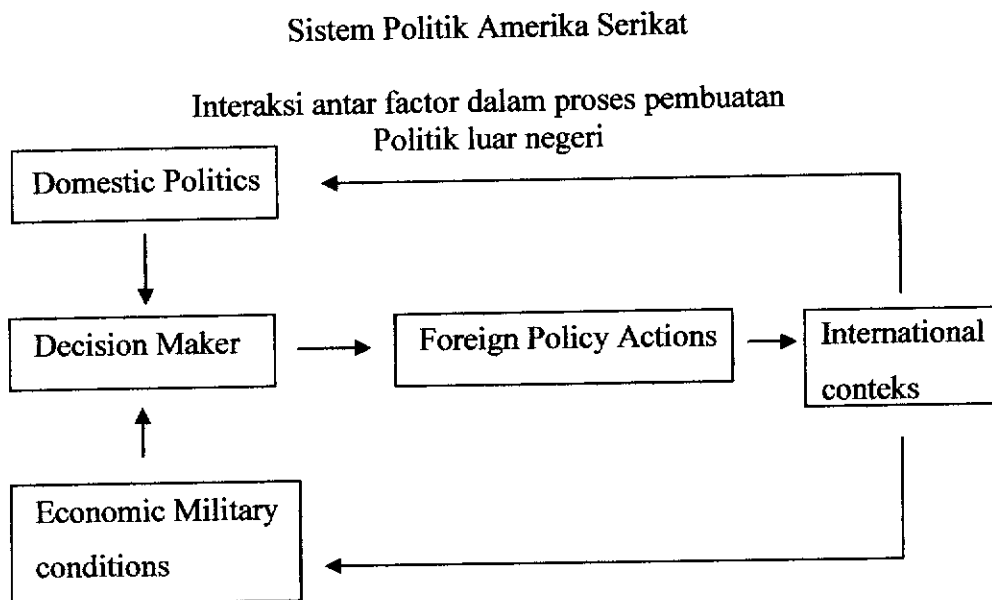
- b. Kemampuan ekonomi dan militer (economic-military capability).

Termasuk di dalamnya factor geografi yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan serta hubungan Negara tersebut dalam perdagangan dan keuangan.

- c. Konteks International (International contact).

Kondisi-kondisi internasional pada saat itu termasuk Negara yang berbatasan dengan satu Negara akan mendorong tindakan-tindakan luar negeri negara tersebut.

Gambar.1



Sumber : William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional : Suatu telaah teoritis, 1974, hal 30

Ilustrasi skema tersebut diatas menjelaskan interaksi variabel sehingga menghasilkan tindakan politik luar negeri suatu negara yang dapat di kategorikan ke dalam dua (2) factor yaitu internal dan eksternal. Teori tersebut akan di gunakan untuk menjelaskan mengapa AS membantu Afganistan setelah AS sendiri yang membombardir dan menghancurkannya. AS mencoba untuk membantu membangun kembali bumi Afganistan setelah AS menggulingkan rezim Taliban yang dianggapnya sebagai penghalang terbesar untuk menaklukkan Afganistan.

1. Politik Dalam Negeri (Domestic Policy) Amerika Serikat.

Kerangka konseptual untuk politik dalam negeri AS berfokus pada hubungan antara para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi politik luar negeri AS. Aktor-aktor politik tersebut di sebut sebagai “ *policy influences* “ (yang mempengaruhi kebijakan). Hubungan antara aktor-aktor politik dalam negeri tadi dengan para pengambil keputusan politik luar negeri di sebut “ *Policy Influences System* “ (Sistem pengaruh kebijakan).¹⁴

Pembuatan keputusan semata-mata di tentukan oleh presiden melainkan terdapat keterlibatan lembaga lain dalam proses tersebut. Bahkan tidak hanya lembaga pemerintahan resmi saja seperti senat dan kongres, tetapi juga lembaga swasta yaitu kelompok-kelompok kepentingan. Struktur politik yang ada di Amerika terdiri atas unit-unit politik yang masing-masing memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, mengendalikan, menguasai dan memerintah, tidak hanya mereka yang terbatas dalam intern organisasi tetapi juga dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan di dalam pemerintah. Secara sederhana unit-unit politik yang ada di AS yang menjadi bangunan dasar struktur politik dapat berupa sesuatu yang kongkrit dan bisa merujuk pada sesuatu yang abstrak. Struktur bangunan politik yang kongkrit termasuk di dalamnya bangunan-bangunan politik formal berupa kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan struktur

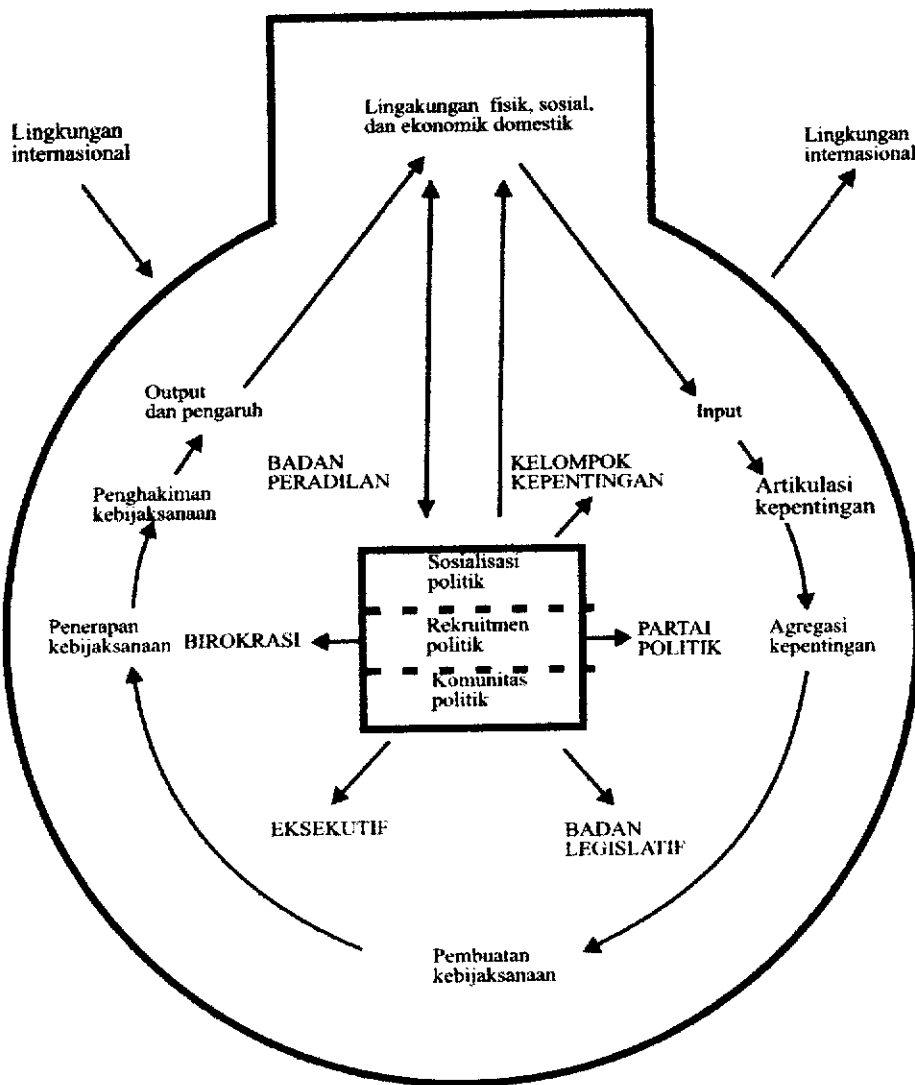
¹⁴ KJ. Holsti, *International Politics*, A Framework For Analysis terjemahan Imam Sudrajat, (Jakarta; Pedoman Ilmu Jaya,1982) hal.175

politik yang lebih abstrak dalam pengertian *Gabriel A. Almond* antara lain : Partai politik dan kelompok kepentingan, serta kelompok lain yang berperan dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik, kesemua itu dapat di kenali dengan pendekatan “ Struktural Fungsional “. Tiga hal yang secara jelas muncul dari definisi Almond tentang system politik adalah : (1) Bahwa suatu system politik adalah suatu keseluruhan yang kongkrit yang mempengaruhi dan di pengaruhi oleh lingkungan-lingkungan, (2) Interaksi-interaksi yang terjadi bukan di antara individu-individu tetapi di antara peranan yang mereka mainkan, (3) Sistem politik merupakan system yang terbuka yang terikat dalam suatu komunikasi yang terus-menerus dengan entitas-entitas dengan system-sistem di seberang perbatasan¹⁵

¹⁵ Gabriel A. Almond, “ A Functional Approach to Comparative Politics “, (Princeton N.J : 1960) hal.299

Gambar. 2

Sistem Politik : Struktur dan Fungsi



Sumber : Gabriel A. Almond, Studi Perbandingan Sistem Politik, 1993, hal.30

Kondisi politik didalam negeri AS pasca tragedi WTC tanggal 11 September 2001, telah porak poranda di terpa serangan jibaku para teroris. Kondisi masyarakat AS secara umum tengah mengalami kepanikan dan trauma yang sangat parah. Masyarakat AS hampir tidak percaya kalau New York dan Washington DC. Bisa hancur. Api membara di benak semua rakyat Amerika, peperangan baru telah di mulai. Segenap aktor politik tertuju pada keputusan untuk membalas serangan tersebut. Presiden AS, George W. Bush (sebagai eksekutif) pun geram dengan ulah para teroris. Ia berpidato di depan rakyatnya, menjanjikan suatu aksi pembalasan dendam yang setimpal, walaupun pada saat itu belum di ketahui siapa yang sesungguhnya yang ada di balik serangan 11 September 2001 tersebut.

Semua elemen dari eksekutif sampai legislatif, dari pembuat keputusan sampai yang menjalankan keputusan sepakat akan hal tersebut di atas. Hal ini juga terlihat dari rapat kongres AS yang langsung sepakat dengan rencana pembalasan dendam Bush, dengan mengucurkan dana untuk membiayai “ perang melawan teroris “ keputusan itu seolah di restui oleh segenap elemen-elemen yang ada di Amerika pada waktu itu. Tidak tanggung-tanggung bahkan dukungan perang melawan teroris pun juga di berikan oleh partai politik yang ada di Amerika. Beberapa kelompok kepentingan pun mengancam serangan terorisme tersebut. Dan akhirnya kondisi tersebut sampai pada kesimpulan bersama bahwa kondisi keamanan dalam negeri AS sedang terancam dan menjadi hal yang wajar

kalau semua elemen politik bersatu dalam sebuah Frame / kerangka berpikir yang sama.

2. Kemampuan ekonomi dan militer Amerika Serikat.

Pengambilan keputusan politik luar negeri harus pula mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militernya, serta kelemahan negaranya ketika ia menyusun politik luar negeri. AS harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasannya, yang di akibatkan oleh kondisi-kondisi ekonomi dan militer. Kekuatan militer sangat berkaitan dengan 3 variabel yaitu : jumlah tentara, kualitas perlengkapan dan tingkat keterampilan. Negara-negara yang sedang berkembang pasti membutuhkan perlengkapan militer yang canggih dari Negara maju seperti : Amerika Serikat, Rusia, Jerman dan Negara maju lainnya.

Perbedaan yang sangat mencolok antara AS dengan Afganistan dalam hal perlengkapan militer merupakan sebuah hal yang sangat berpengaruh ketika AS menyatakan perang dengan Afganistan. AS yakin dan percaya pada jumlah tentaranya, pada alat-alat militernya jauh lebih sempurna di banding dengan Afganistan pada waktu itu. Hal itu dapat kita lihat pada keputusan AS tentang personil militer dan perlengkapan militer yang di milikinya. Pada saat penyerangannya ke bumi Afganistan, tidak tanggung-tanggung jumlahnya antara lain¹⁶ :

1. Kapal induk USS Carl Vincen.

¹⁶ *Koran Tempo*, 8 Oktober 2001

Berlokasi di teluk Persia, basisnya di Bremantin, Washington. Personil 5600, pesawat terbang 90 buah, kecepatan 30 knot, bertenaga nuklir, pesawat F-14 Tomcat, helikopter SH-60 Seahawk, S-3 Viking, FA-18 Hornet, C-2 Grehound, E-2 Hawkeyes dan EA-6 Prowlers.

2. Kapal induk USS Enterprise.

Berlokasi di Laut Arab, personil 5800, pesawat terbang 85 buah, kecepatan 30 knot, bertenaga nuklir, pesawat FA-18 Hornet, F-14 Tomcat, S-3 Viking, T-2 Hawkeyes, Helikopter SH-60 Seahawk dan Helikopter HH-60 Pavehawk.

Kapal pendukung, dua (2) kapal selam USS Providence dan USS Jacksonville, Dua (2) kapal penjelajah USS Philippine Sea dan USS Gettysburg, lima (5) kapal perusa : USS mc Faull, USS Gonzales, USS Stout, USS Thorn dan USS Nicholson.

3. Kapal induk USS Kitty Hawk

Lokasi di Samudera Hindia, berpangkalan di Jepang, personil 3150, kecepatan 30 knot.

4. Kapal induk USS Theodore Roosevelt.

Lokasi di laut tengah, personil 5500, pesawat tempur 85, kecepatan 30 knot, bertenaga nuklir dua reactor, pesawat tempur F-14 Tomcat, FA-18 Hornet, E-2 Hawkeyes, EA-6 Prowler, S-3 Viking, Helikopter SH-60 Seahawk, Helikopter HH-60 Pave Hawk.

Jika kita melihat pada kemampuan militer yang di miliki AS, jelas sangat jauh perbedaanya dengan Afganistan. Dengan hanya mengerahkan 4 kapal induknya AS sudah mempunyai jumlah personil yang tidak sedikit. Keputusan AS untuk menyerang Afganistan dan juga mendapat dukungan dari oposisi Aliansi Utara yang terdiri dari suku Usbeks dengan 3000 personil, Suku Hazaras dengan 3000 personil dan suku Tajiks dengan 15.000 personil.¹⁷

Kemampuan secara ekonomi serta kemampuan secara kemiliteran, membuat AS selalu optimis dalam setiap keputusan luar negeri yang di ambilnya. AS mempunyai perangkat-perangkat yang sangat lengkap terutama berhubungan dengan militer. Sektor militer AS merupakan salah satu sector yang selalu di jaga secara financial oleh pemerintah AS. Amerika tidak tanggung-tanggung terhadap perlengkapan militernya, Setiap saat penelitian-penelitian selalu di lakukan oleh pihak militer. Hal ini juga tidak terlepas dari sokongan dana jutaan bahkan milyaran dolar yang setiap tahunnya di keluarkan oleh pemerintah. AS sadar betul bahwa sebuah Negara Adi Daya tidak akan bisa bertahan lama jika tidak di dukung oleh kemampuan militer yang canggih dan kuat.

Oleh karrena menyadari hal itulah AS tidak pernah ragu-ragu untuk mengeluarkan anggaran yang besar untuk militernya.

3. Konteks International

AS merupakan Negara Adi Daya yang benar-benar mempunyai kekuasaan. AS di percaturan International mempunyai banyak sekutu yang

¹⁷ *Ibid.*,

kesemuanya patuh dan tunduk serta loyal padanya, adanya dukungan yang kuat dari sekutu-sekutunya, selalu membuat AS tidak terbantahkan dalam setiap pengambilan keputusan luar negeri yang dia ambil. Keputusan AS menyerang Afganistan dan menumbangkan rezim Taliban mendapat dukungan dari sekutu-sekutunya, antara lain Inggris, Perancis, Jepang, dan Arab Saudi. Inggris tidak tanggung-tanggung membantu AS dengan menurunkan pasukan elitnya “ *Special Air Service* ” (SAS) yang siap bergabung dengan tentara Amerika. Perancis melalui perdana menteriya “ *Lionel Jospin* “ menyatakan dukungan terhadap AS dan wilayah udaranya di izinkan untuk digunakan oleh pesawat AS serta bersedia memberikan logistic bagi pasukan AS di laut India. Kongres Jepang melalui Perdana Menteriya, “ *Junichiro Koizumi* “ mendukung rencana AS memerangi terorisme dengan menyediakan transportasi pesawat untuk mengangkut para pengungsi keluar Afganistan jika AS benar-benar menyerang Afganistan.

Besarnya dukungan yang di peroleh AS pada waktu itu dari masyarakat International juga tidak terlepas dari kondisi masyarakat International yang sadar akan kedamaian. Keinginan bersama memerangi teroris mendapat dukungan yang luas bahkan bukan hanya sebatas sekutu AS saja tapi Negara-negara seperti : Oman, Mesir, Usbekistan, Turki dan bahkan Pakistan ikut-ikutan mendukung AS dengan rencana perangnya terhadap Taliban. Dan walaupun akhirnya Taliban dan teroris hanya menjadi konotasi negatif, telah mempermudah AS mendapatkan dukungan. Alasan-alasan menyerang teroris selalu di jadikan senjata untuk

menumbangkan sebuah rezim. Hal ini tercermin dari penyerangan yang dilakukan oleh AS terhadap Afganistan yang menghancurkan rezim Taliban.

Dalam konteks lain sebenarnya AS menjadi satu-satunya Negara yang mempunyai kekuasaan besar setelah Uni Soviet runtuh, Sehingga posisinya di percaturan dunia politik semakin kokoh. Pengaruh Negara ini semakin meyebar ke seluruh negara, Bahkan dengan segala kemampuan yang di milikinya, Amerika mampu mendikte kerja badan dunia seperti, PBB. Keistimewaan tersebut di rasa terusik, ketika dunia Islam bangkit dan seiring dengan itu teroris menjadi symbol dalam merusak kekuasaan Amerika Serikat. Oleh karenanya AS berusaha agar keadaan dan kepentingannya tetap dapat di pertahankan dengan mengendalikan pengaruh dan kekuasaan yang di milikinya.

2. POLITIK LUAR NEGERI

politik luar negeri sebagai salah satu sarana untuk melakukan eksplanasi teoritik yang komprehensif dalam memahami perilaku politik AS dalam membuat kebijakan nasional terhadap Afganistan setelah menumbangkan rezim Taliban. Penggunaan teori ini di harapkan bermanfaat untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di Afganistan pasca runtuhnya rezim Taliban.

Bagaimanapun luasnya penelaahan terhadap perilaku luar negeri AS atau tingkah laku politik luar negeri AS di Afganistan, tetap pada batasan bahwa politik luar negeri merupakan suatu tindakan yang terencana dan sudah di perhitungkan minimal dan maksimalnya tentang untung ruginya serta baik buruknya. Suatu

mekanisme bagi suatu politik untuk beradaptasi dengan lingkungan geopolitiknya dan untuk mengendalikan lingkungan itu demi mencapai tujuannya¹⁸.

Politik luar negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Alton, sebagai berikut :

*“Foreign policy is a strategy or planned course of action developed by the decision makers of a state vis a vis other states or international entities, aimed at achieving specific goals defined in term of national interest.”*¹⁹

Jadi politik luar negeri adalah strategi atau tindakan terencana yang di kembangkan oleh para pembuat keputusan yang di tujukan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan nasionalnya. Politik luar negeri meliputi proses yang dinamis dalam menetapkan interpretasi yang relative mantap terhadap kepentingan nasionalnya dalam menghadapi factor-faktor situasional yang sering berubah di lingkungan International. Proses ini untuk mengembangkan tindakan-tindakan yang di ikuti olah usaha-usaha untuk mencapai pelaksanaan garis-garis kebijakan luar negerinya²⁰. Tujuan politik luar negeri untuk mewujudkan tujuan, cita-cita nasional serta memenuhi kebutuhan utama suatu Negara. Politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional Negara tersebut.

Jadi politik luar negeri dapat di gunakan atau terjadi apabila interaksi yang di lakukan dalam bentuk hubungan terhadap masyarakat international bertujuan

¹⁸ Mohtar Masoed, *Studi hubungan internasional tingkat Analisa dan Teorisasi*, PAU SS (Yogyakarta; Universitas Gajah Mada, 1990) hal.115

¹⁹ Jack C Plano & Roy Olton, *International Relation Dictionary*, (USA; Rinehartean Winstone. Inc, 1969) hal.128

²⁰ *Ibid.*, hal.127

untuk memenuhi kepentingan nasional dan demikian seperti apa yang di kemukakan oleh KJ. Holsty.

“ Pokok permasalahan dalam penentuan kebijakan luar negeri pada umumnya ai titik beratkan pada usaha untuk memecahkan berbagai persoalan yang berhubungan dengan masalah dalam negeri. ”²¹

Jika di lihat dari tujuan kebijakan luar negeri AS secara umum di laksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan dasar sebagai berikut :²²

a. Keamanan Nasional. (national security)

Tujuan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat berusaha untuk tetap bebas, merdeka dan aman dari segala pengaruh maupun invasi dari pihak luar yang tidak di inginkan. Kebijakan luar negeri Amerika terhadap suatu negara atau kawasan sangat berkaitan dengan kepentingan Amerika untuk menjaga keamanan negara yang bebas dan merdeka.

b. Perdamaian dunia (world peace).

Salah satu tujuan jangka panjang dari kebijakan luar negeri Amerika adalah mewujudkan perdamaian dunia. Para pemimpin AS mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia karena hal tersebut adalah cara terbaik untuk melindungi dan menjamin keamanan nasionalnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Amerika bekerjasama dengan negara-negara lain atau organisasi dalam menyelesaikan masalah-masalah internasionalnya, disamping itu

²¹ KJ. Holsty, *Op., Cit., hal. 78*

²² Richard C. Remy, Lary Elowitz and William Berlin, *Government Indonesia the United State*, (New York; Mac Milliam Publishing Company, 1984) hal.30

pemerintah Amerika mengirim bantuannya kepada negara-negara lain dan membentuk aliansi dengan negara-negara di semua kawasan di dunia.

c. Pemerintah Sendiri (Self Government)

Kebijakan luar negeri AS yang lain adalah mendukung setiap Negara untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Amerika selalu mendukung Negara lain yang menganut system demokrasi dan mencoba untuk membantu Negara lain untuk lebih demokratis, karena hal itu juga merupakan cara melindungi keamanan Amerika.

d. Perdagangan yang bebas dan terbuka (free and open trade).

Amerika membutuhkan pasar di luar negeri untuk memasarkan produk-produknya. Untuk itu Amerika berusaha melakukan dan mempertahankan system perdagangan yang bebas dan terbuka sangat penting untuk mencapai kepentingan dan keamanan nasional Amerika.

e. Kepedulian terhadap kemanusiaan (concent for humanity).

Amerika memprhatikan dan membantu masyarakat di dunia baik yang di akibatkan oleh bencana alam seperti gempa bumi dan kelaparan, maupun akibat perang . Kebijakan ini juga merupakan salah satu cara untuk menjaga stabilitas dunia.

Berdasarkan garis besar tujuan tersebutlah politik luar negeri AS di ambil putusan apapun yang berkenaan dengan keamanan nasional merupakan suatu yang harus di garis bawahi. Ketika keamanan nasional AS terancam oleh teroris maka keluar kebijakan untuk memberantas teroris di manapun dan kapan pun ia

ada. Karena teroris sangat membahayakan eksistensi Pemerintah AS, sehingga AS menganggap teroris sebagai musuh utama Pemerintah AS yang harus segera di berantas demi keamanan nasional AS.

3. KONSEP KEPENTINGAN NASIONAL.

Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek atau fenomena tertentu. Konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan.²³

Konsep kepentingan nasional ini sering di pakai sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam politik nasional. Bahkan sering kali dipakai sebagai ukuran keberhasilan.²⁴ Setiap bangsa akan melakukan hubungan dengan bangsa lain dengan memisahkan politik luar negerinya dengan Politik dalam negeri. Politik Luar negeri di gunakan sebagai pengejawantahan kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain.²⁵

Tujuan Politik Luar Negeri adalah untuk mewujudkan cita-cita nasional serta memenuhi kebutuhan utama suatu negara. Kepentingan nasional sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan politik luar negerinya. Politik luar negeri sebagai langkah nyata guna mencapai, mempertahankan, dan melindungi kepentingan nasional negara tersebut.

²³ Mohtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, LP3ES, Jakarta, 1990, hal 109

²⁴ Mohtar Mas' oed, Op Cit, hal 135

²⁵ SL. Roy, *Diplomas* terjemahan Harwanto & Mirsawati, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hal.31

Jack C. Plano & Roy Olton mendefinisikan kepentingan nasional sbb :²⁶

“National interest is the fundamental and ultimate determinan that guides the decision maker of a state in making foreign policy the national interes of a state is typical a highly generalized conception of those element that constitute the state most vital needs. They include self preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic well being.”

Dari penjelasan tersebut dapat di artikan bahwa politik luar negeri suatu negara adalah strategi atau serangkaian kegiatan yang terencana dan di kembangkan oleh para pembuat keputusan dari suatu negara terhadap negara lain atau terhadap suatu entitas internasional yang di tujukan untuk meraih tujuan spesifik yang berdefinisi interen bagi kepentingan nasionalnya.

F. HIPOTESA

Berdasarkan teori dan konsep di atas dapat di tarik suatu hipotesa bahwa kebijakan politik luar negeri AS di Afganistan di pengaruhi oleh tiga hal yaitu :

a. Kondisi Politik Dalam Negeri.

Tindakan Pemerintah AS dalam agresinya ke Afganistan mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan elit politik dalam negeri baik dari kelompok kepentingan, partai politik dan Badan peradilan. Selain itu G.W Bush juga ingin mengembalikan dan membangun Pemerintahan Afganistan

²⁶ Jack C. Plano & Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, Rinehart and Winstone, 1969, p. 128

b. Kemampuan Ekonomi dan Militer.

AS ingin menguasai sumber daya alam Afganistan dan menanamkan pengaruhnya di wilayah tersebut. Serta ingin menunjukkan kekuatan militer AS yang sebenarnya di mata dunia Internasional.

c. Konteks Internasional.

Memulihkan citra dan nama baik Pemerintah AS, Khususnya Presiden G.W Bush di mata masyarakat Internasional. Dan mewujudkan Sistem Demokrasi Global.

G. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti dalam tulisan ini di bedakan menjadi 2 yaitu Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisa Data.

1. Teknik pengumpulan Data.

Teknik yang di pergunakan dalam pengumpulan data adalah penguasaan dokumen. Penulis akan mengumpulkan informasi tentang politik luar negeri AS terhadap Afganistan pasca runtuhnya rezim Taliban. Dengan mengumpulkan data dari buku-buku tentang politik luar negeri AS, Teori kepentingan Nasional, Teori pengambilan kebijakan luar negeri dan buku-buku tentang Afganistan sebelum dan sesudah Taliban berkuasa. Selain itu penulis juga menghimpun data dari jurnal, majalah, ensiklopedia, surat kabar dan media-media informasi lainnya seperti Internet.

2. Metode Analisa Data.

Dalam melakukan analisa data, penulis akan menggunakan metode deskriptif analitis dan prediktif. Segala aspek dalam hal kebijakan luar negeri AS yang di terapkan terhadap Afganistan pasca jatuhnya rezim Taliban akan menjadi sorotan utama dalam penulisan ini. Sedangkan teori akan di jadikan alat untuk menganalisis fakta dan data yang di peroleh.

H. JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkauan dari penelitian ini adalah saat berakhirnya rezim Taliban, tepatnya pada tahun 2001 sampai pada tahun 2005 saat pemilu kabinet di laksanakan (terbentuknya kabinet baru), Namun tidak menutup kemungkinan juga pada era Rezim Taliban atau sebelum terjadinya Insiden 11 september 2001 di Amerika, masih dalam jangkauan penelitian ini, yang juga penulis anggap masih relevan dengan penulisan skripsi ini.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan berbagai subtopik pembahasan, sebagai berikut :

BAB I : Membicarakan Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Landasan Teoritik (Teori Decision Maker dan Politik Luar Negeri), Hipotesa, Metodologi Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Membicarakan tentang Gambaran umum politik luar negeri Amerika Serikat dan arah kebijakan politik luar negeri GW. Bush

BAB III : Membahas pemerintahan Afganistan era berakhirnya Taliban

BAB IV : Pelaksanaan Politik Luar Negeri Amerika di Afganistan

BAB V : Kesimpulan dari seluruh pembahasan.